

RESEARCH ARTICLE

Evaluasi Kinerja BPP Kostratani di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

**Yohanes Yan Makabori<sup>1</sup>**  
Politeknik Pembangunan  
Pertanian Manokwari  
[yanmkw@gmail.com](mailto:yanmkw@gmail.com)

**Berlyn Eka Aprianti<sup>2</sup>**  
Politeknik Pembangunan  
Pertanian Manokwari  
[berlynekaa@pertanian.go.id](mailto:berlynekaa@pertanian.go.id)

**Djaka Mastuti<sup>3\*</sup>**  
Dinas Pertanian dan Ketahanan  
Pangan Kabupaten Manokwari  
[djakamastuti@gmail.com](mailto:djakamastuti@gmail.com)

Artikel Info

Diterima 10/02/2023  
Diterima dan disetujui 27/03/2023

Diterima dalam bentuk revisi 21/03/2023  
Tersedia online 31/03/2023

Abstrak

**Latar belakang:** Penyuluhan Pertanian memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya petani. Dalam pelaksanaan sistem penyuluhan ada hambatan-hambatan yang mempengaruhi jalannya kegiatan dan keberhasilan penyuluhan. Faktor penghambat kinerja penyuluh apa saja yang mempengaruhi jalannya penyuluhan di wilayah kerja BPP tersebut.

**Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini meliputi tiga Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang ada di daerah Manokwari Provinsi Papua Barat diantaranya BPP Nuni Distrik Manokwari Utara, BPP Warmare Distrik Warmare, dan BPP Marina Distrik Manokwari Barat. Penentuan informan dilakukan dengan Teknik *Snowball Sampling*. Sementara teknik pengumpulan data dilakukan observasi, wawancara mendalam dengan informan serta pemanfaatan dokumen tertulis. Teknik analisis data yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

**Hasil:** Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan BPP Kostratani di Kabupaten Manokwari tidak berjalan efektif.

**Kesimpulan:** Lima fungsi kostratani menunjukkan berjalan dengan baik hanya pada proses pelaksanaannya sedangkan bentuk program tidak sesuai dengan kebutuhan BPP kostratani sehingga tidak berjalan efektif. Dari perbandingan ini menunjukkan hasil pelaksanaan program tidak efisien dalam pencapaian tujuan.

**Kata kunci:** Balai, Kinerja, Kostratani, Penyuluh

\*Penulis Korespondensi: *Yohanes Yan Makabori, Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari, yanmkw@gmail.com*

**Sitasi:** Makabori, Y.Y., Berlyn, E.A., & Djaka, M. (2023). Evaluasi Kinerja BPP Kostratani di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. *Journal of Sustainable Agriculture Science*, 1(1):37-43.



© 2023 Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari

## Abstract

**Background:** Agricultural Extension plays an important role in improving the quality of farmer resources. In the implementation of the extension system, there are obstacles that affect the course of activities and the success of counseling. What factors hinder the performance of extension workers that affect the course of counseling in the BPP work area.

**Method:** This study used qualitative research methods. The location of this research includes three Agricultural Extension Centers (BPP) in the Manokwari area of West Papua Province, including BPP Nuni North Manokwari District, BPP Warmare Warmare District, and BPP Marina West Manokwari District. The determination of informants is done by Snowball Sampling Technique. Meanwhile, data collection techniques are carried out observation, in-depth interviews with informants and the use of written documents. Data analysis techniques are by reducing data, presenting data and drawing conclusions.

**Results:** The results obtained from this study show that the implementation process of BPP Kostratani in Manokwari Regency is not running effectively.

**Conclusion:** The five functions of the kostratani show that it runs well only in the implementation process while the form of the program is not in accordance with the needs of the kostratani BPP so that it does not run effectively. From this comparison, it shows that the results of program implementation are inefficient in achieving goals.

**Keywords:** Hall, Performance, Kostratani, Extension

## PENDAHULUAN

Penyuluhan pertanian, memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya petani. Melalui proses pembelajaran, petani diharapkan mampu mengakses informasi teknologi, permodalan, pasar dan informasi lain sesuai kebutuhan. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan akhirnya bermuara kepada peningkatan kesejahteraan hidup. Hal tersebut penting karena sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian diupayakan agar tidak menimbulkan ketergantungan petani kepada penyuluh, akan tetapi diarahkan untuk mewujudkan kemandirian petani dengan memosisikannya sebagai wiraswasta agribisnis, agar petani dapat berusahatani dengan baik dan hidup layak berdasarkan sumberdaya lokal yang ada disekitar petani. Hal ini membutuhkan kinerja penyuluh pertanian yang terintegrasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyuluh pertanian dalam merencanakan, mengorganisasikan, dan mengevaluasi program penyuluh pertanian (Bahua, 2010). Peranan kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Wilayah Binaan Penyuluh Pertanian, menjadi faktor kunci akses mengakses kepentingan petani sehingga dapat lebih dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan petani. Menurut Rangga et al. (2020) bahwa bergabung dalam poktan maupun gapoktan sangat penting karena dengan bergabung dengan kelompok tersebut dapat memberikan kemudahan petani dalam mengolah usahatani.

BPP Manokwari adalah BPP yang terdapat di Distrik Manokwari Barat. BPP Warmare adalah BPP yang terdapat di Distrik Warmare dan BPP Nuni adalah BPP yang terdapat di Distrik Nuni Manokwari Utara. BPP Manokwari adalah BPP yang berada dilingkup kerja BPP Manokwari, dan memiliki Kelompok Tani Pemula, BPP Warmare berada dilingkup kerja BPP Warmare dan memiliki Kelompok Tani Pemula, dan BPP Nuni berada dilingkup kerja BPP Manokwari Utara. Terkait keadaan

kelompok tani disana terdapat penyuluh-penyuluh lapangan yang bertugas menopang/ membina usaha tani mereka. Namun dalam sistem penyuluhan tentu ada hambatan-hambatan dalam kegiatan penyuluhan yang tentu saja berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan yang mempengaruhi jalannya kegiatan dan keberhasilan penyuluhan tersebut. Tentu faktor tersebut tidak lain berasal dari internal maupun eksternal dimana faktor internal yaitu pendidikan formal, pelatihan diklat yang rendah diikuti umur penyuluh, masa kerja penyuluh, motivasi jabatan. Sedangkan faktor eksternal yaitu ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sistem penghargaan komoditi di Wilayah binaan, kebijakan pemerintah, intensitas penyuluh yang dilakukan/ kelengkapan dokumen penunjang penyuluh dan tempat tinggal penyuluh. kelembagan. Untuk itu perlu adanya penelitian di BPP Manokwari, BPP Warmare, dan BPP Nuni terkait faktor penghambat kinerja penyuluh apa saja yang mempengaruhi jalannya penyuluhan di tiga wilayah kerja BPP tersebut.

Kostratani merupakan gerakan pembaharuan pembangunan pertanian kecamatan, melalui optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan pertanian. Peran BPP dinilai sangat strategis sebagai komponen yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah lingkup Ditjen Tanaman Pangan, terutama dalam hal usulan CPCL (Calon Petani Calon Lokasi), pengawalan tanam, budidaya, panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran di tingkat petani, Poktan/Gapoktan. Pada Permentan No.49 Tahun 2019 dijelaskan bahwa tugas Kostratani salah satunya adalah melaksanakan koordinasi dan sinergi kegiatan pembangunan pertanian.

Dalam rangka penguatan peran Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kostratani dalam mendukung pembangunan pertanian di Kabupaten Manokwari, Dinas Pertanian Kabupaten Manokwari melaksanakan temu teknis bagi penyuluh. Pelaksanaan kegiatan ini digunakan sebagai bahan evaluasi bagi penyuluh yang berada di WKPP dari masing-masing BPP tersebut. Hal ini dapat menjadi proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong serta mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya. Langkah ini sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kegiatan temu teknis ini diikuti oleh penyuluh dari BPP Manokwari, BPP Warmare, dan BPP Nuni. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/ OT.140/10/2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan yang berisikan Tugas dan Fungsi Penyuluh yaitu (1) menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten/kota; (2) melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan, menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar, memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama; (3) memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; (4) melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha sedangkan fungsi yaitu: Balai penyuluhan di kecamatan mempunyai fungsi sebagai tempat pertemuan untuk memfasilitasikan pelaksanaan tugas balai sebagaimana diamanatkan dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

## METODE

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di BPP Manokwari Barat, BPP Manokwari Utara, dan BPP Warmare Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, selama dua bulan mulai dari bulan Maret sampai dengan Mei 2022. Ketiga BPP ini sudah memiliki wilayah kerja dari masing-masing BPP tersebut dan juga sudah mewakili dari enam BPP yang terdapat/berada di Kabupaten Manokwari.

Metode yang di gunakan dalam pengumpulan data yaitu *snowball sampling*. Menurut Sugiyono (2010), *snowball sampling* adalah sebagai teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini sendiri disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak.

### Parameter yang Diukur

Menurut Arikunto (2009), variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi suatu titik perhatian dalam penelitian. Variabel adalah sesuatu yang dapat diukur atau dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam kajian ini variabel yang akan diukur adalah Penyuluh, yang diukur yaitu kinerja penyuluh dalam melaksanakan kegiatan Penyuluhan di Wilayah kerja BPP Manokwari Barat, BPP Manokwari Utara, dan BPP Warmare meliputi bukti program kerja, bukti materi penyuluhan, bukti evaluasi program kerja dan evaluasi penyuluhan, serta bukti pelaporan kegiatan.

### Metode Pengambilan Sampel

Berdasarkan hasil Identifikasi BPP Manokwari Barat, BPP Manokwari Utara, dan BPP Warmare yang menjadi populasi yaitu semua penyuluh pertanian yang berada di BPP tersebut dan pengambilan sampel yang diwakili oleh 3 orang penyuluh pertanian dari masing-masing BPP tersebut, sehingga jumlah yang di ambil untuk memperoleh data dan informasi berjumlah 9 orang penyuluh pertanian yang terdiri dari kepala BPP dan 2 orang penyuluh yaitu penyuluh pria dan penyuluh wanita. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara mendalam, yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung kepada Penyuluh (PPL) di distrik Manokwari Barat, Distrik Manokwari Utara dan Distrik Warmare
- b. Observasi dan Dokumentasi kegiatan kajian dan interview/wawancara.

Menurut Miles dan Huberman (1992), analisis data terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi dan kembali ke data awal. Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan teknik menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Untuk analisis kinerja BPP Kostratani secara kualitatif menggunakan tabulasi model Teknik evaluasi kelas kelompok tani.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Cara mengetahui nilai skoring tingkat kinerja BPP Kostratani secara kualitatif, menggunakan model evaluasi kelas kelompok tani. Tingkat kinerja BPP Kostratani dapat dilihat pada tingkat kinerja yang ada dimasing-masing BPP dengan menggunakan tingkat kategori yaitu tinggi, sedang dan rendah, untuk mengetahui rata-rata dapat dilihat pada fungsi BPP Kostratani yang berjalan dimasing-masing wilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP). Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh maka ada dua hal yang harus di tingkatkan yaitu dari fungsi ke dua tentang Pusat gerakan pembangunan pertanian yang harus lebih ditingkatkan lagi sehingga fungsi yang ada di masing-masing BPP dapat di jalankan dengan baik. Program yang dijalankan masih kurang untuk peningkatan BPP

Kostratani sehingga masih banyak yang harus diperbaiki dengan fungsi kostratani yang ada. Menurut Marliati *et al.* (2008), faktor-faktor karakteristik sistem sosial yaitu: sistem kelembagaan petani; akses petani terhadap tenaga ahli, kelembagaan penelitian dan penyuluhan dan kepemimpinan lokal belum berpengaruh secara nyata terhadap kinerja pemberdayaan oleh penyuluh pertanian. Faktor-faktor ini seharusnya juga ditingkatkan untuk lebih meningkatkan tingkat kinerja penyuluh pertanian dalam memberdayakan petani.

Tabulasi hasil analisis menunjukkan bahwa rata rata fungsi BPP Sebagai Pusat Gerakan Pembangunan Pertanian diwilayah kecamatan di kabupaten Manokwari hanya mencapai 52% BPP harus menggerakkan pembangunan pertanian, dimana BPP di Manokwari baru menjalankan fungsi sebesar 52% dengan kategori sedang dan juga BPP baru mampu melaksanakan sekitar 52% dari fungsi pusat gerakan pembangunan pertanian. Sedangkan Pusat data dan informasi pertanian memiliki nilai rata-rata 78% dengan kategori tinggi, pusat pembelajaran untuk peningkatan kapasitas SDM nilai rata-rata 66% dengan kategori tinggi, Pusat konsultasi agribisnis sebagai tempat konsultasi pelaku usaha dengan melibatkan instansi/lembaga terkait memiliki rata-rata 91% dengan kategori tinggi, Pusat pengembangan jejaring kemitraan sebagai tempat pengembangan kemitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha dengan pihak lain dengan rata-rata 100% dengan kategori tinggi dari ke empat fungsi memiliki indikator yang lemah dimana kinerja BPP masih kurang dalam membuat indikator sehingga indikator yang di buat dapat tercapai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja BPP Kostratani di Kabupaten Manokwari khususnya pada BPP Nuni, BPP Warmare, dan BPP Marina adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya kesadaran penyuluh dalam mengembangkan BPP kostratani.

Peran BPP di Kabupaten Manokwari dalam meningkatkan kinerja BPP Kostratani belum optimal, sehingga pelaksanaan kinerja tersebut belum mencapai target. Hal tersebut dapat terjadi salah satunya karena kurangnya kesadaran penyuluh dalam mengembangkan kinerja BPP Kostratani. Untuk mengoptimalkan peran BPP perlu adanya kesadaran para penyuluh, peningkatan kemampuan penyuluh yang meliputi penguasaan ilmu dan keterampilan serta sikap yang dimiliki.

b. Kurangnya sarana dan prasarana.

Kurangnya sarana dan prasarana sangat mempengaruhi tingkat kinerja BPP KOSTRATANI. Sarana dan prasarana yang dimaksud seperti komputer, ruangan, jaringan internet. Untuk meningkatkan kembali kinerja BPP perlu adanya perbaikan dari segi sarana dan prasarana yang ada di BPP. Berdasarkan Hasil penelitian Syafruddin *et al.* (2013) menunjukkan bahwa faktor dukungan sarana dan prasarana penyuluh tidak berpengaruh nyata terhadap kinerja penyuluh pertanian. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa masih ada sarana dan prasarana pendukung yang belum layak seperti kondisi fisik rumah pemotongan hewan (RPH), belum tersedianya jaringan internet di BP4K, Bp3K, kelayakan pakai mesin dan alat pertanian/peternakan, alat bantu penyuluhan (audio, visual dan audio-visual), sarana transportasi penyuluh dan tingkat kelayakan bantuan operasional penyuluh (BOP) sehingga pelaksanaan penyuluhan pertanian belum maksimal.

c. Kurangnya pembelajaran untuk peningkatan kapasitas SDM

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) mempunyai peran yang sangat penting dalam keberlangsungan kegiatan penyuluhan. Semakin mampu penyuluh untuk mengatasi masalah usaha

tani masyarakat, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, kurangnya pembelajaran untuk peningkatan kapasitas SDM mempengaruhi kinerja BPP hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman penyuluh terhadap kapasitas SDM. Menurut Herawati *et al.* (2021), diperlukan Komitmen dan aksi nyata Pemerintah Daerah untuk mendukung Kostratani sebagai pusat Pusat data dan informasi, Pusat pembelajaran untuk penyuluh dan petani, Pusat gerakan pembangunan pertanian, Pusat konsultasi agribisnis dan Pusat pengembangan jejaring kemitraan.

d. Kurangnya jejaring kemitraan.

Untuk meningkatkan kinerja BPP Kostratani salah satunya dengan membangun jejaring kerja atau membina hubungan kerja dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka mencapai tujuan bisnis. Dalam membangun pertanian yang berorientasi agribisnis, penyuluh pertanian perlu untuk merekonstruksi dirinya kearah agribisnis. Kerja sama dan koordinasi dengan badan-badan yang menangani produk pengolahan dan pemasaran hasil serta pihak-pihak penyedia modal perlu dilakukan penyuluh untuk kepentingan bisnis petani. Dengan demikian, agar penyuluh bisa membantu bisnis petani dan melaksanakan program agribisnis dengan baik maka kemampuan penyuluh dalam membangun jejaring kerja perlu ditingkatkan. Hal ini dapat menyokong peningkatan kinerja BPP Kostratani.

e. Kurangnya pembiayaan untuk mendorong peningkatan BPP Kostratani.

Dalam hal kurangnya pembiayaan untuk mendorong peningkatan BPP Kostratani yaitu perlu adanya pemantauan langsung dari Dinas Pertanian atau pemerintah setempat untuk mendukung jalannya kinerja sehingga para penyuluh dapat mengembangkan BPP Kostratani tanpa menggunakan biaya dari masing-masing penyuluh di setiap WKPP. Wahyuni *et al.* (2019) menyatakan bahwa untuk mengoptimalkan peran BPP dalam melaksanakan penyuluhan perlu dilakukan pembenahan dan perbaikan dalam berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut mencakup sarana dan prasarana, akomodasi dan pembiayaan, serta peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya penyuluh. Nurdyawati *et al.* (2020) menyatakan bahwa kurangnya fasilitas pendukung kegiatan penyuluhan mengakibatkan rendahnya kinerja penyuluh BPP Balongpanggang, oleh karena itu sebaiknya pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap kegiatan penyuluhan dengan mencukupi fasilitas prasarana dan sarana penyuluhan serta meningkatkan anggaran untuk bisa lebih sering melakukan kegiatan seperti demonstrasi maupun temu-temu, sehingga prestasi kerja penyuluh dapat ditingkatkan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Tingkat kinerja BPP Kostratani dari ke tiga BPP di Kabupaten Manokwari sangat minim karena dari kinerja yang di buat tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan faktor kinerja BPP Kostratani yang terdapat di tiga BPP terdapat lima faktor yang menghambat diantaranya: kurangnya kesadaran penyuluh dalam mengembangkan BPP Kostratani, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya pembelajaran untuk peningkatan kapasitas SDM, kurangnya jejaring kemitraan, kurangnya pembiayaan untuk mendorong peningkatan BPP Kostratani.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI

Dalam artikel ini, Yohanes Yan Makabori berperan sebagai kontributor utama, sementara Berlyn Eka Aprianti sebagai kontributor anggota dan Djaka Mastuti sebagai kontributor anggota. dan kontributor korespondensi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2009). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bahua, M.I. (2010). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyuluh Pertanian dan Dampaknya Pada Perilaku Petani Jagung di Provinsi Gorontalo. (*Disertasi tidak dipublikasikan*). Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor.
- Herawati, H., Asnidar, A., & Saidah, S. (2021). Upaya Peningkatan Pengetahuan Melalui Temu Tugas Peneliti–Penyuluh di Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Agribisnis Terpadu*, 14(1), 115-136.
- Marliati, M., Sumardjo, S., Asngari, P. S., Tjitropranoto, P., & Saefuddin, A. (2008). Faktor-Faktor Penentu peningkatan kinerja penyuluh pertanian dalam memberdayakan petani (Kasus di Kabupaten Kampar Provinsi Riau). *Jurnal Penyuluhan*, 4(2), 92-99.
- Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1992). *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru (Penerjemah: T.R Rohidi)*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Nurdyawati, R., Soedarto, T., & Sumartono, S. (2020). Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik. *Jurnal Pertanian Cemara*, 17(1), 49-56.
- Permentan No.49 Tahun (2019) Tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/ OT.140/10/2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan.
- Rangga, K., Mutolib, A., Yanfika, H., Listiana, I., & Nurmayasari, I. (2020). Tingkat Efektivitas Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Agribisnis Terpadu*, 13(1), 1-16.
- Sugiyono, D. (2010). *Metode penelitian kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 26-33.
- Syafruddin, S., Hariadi, S. S., & Wastutiningsih, S. P. (2013). Kinerja penyuluh pertanian berdasarkan faktor personal dan situasional. *Jurnal Psikologi UGM*, 40(2), 240-257.
- Wahyuni, S., Helmi, H., Tanjung, H. B., & Oktavia, Y. (2019). Peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam Penyuluhan Komoditi Pangan (Studi Kasus di Kabupaten Tanah Datar). *Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 235-248.